

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI WILAYAH PERBATASAN

Nunukan Regency Government Strategy In Overcoming Poverty In Border Areas

Nama Penulis ✉

Wawan Sumardiyono^{1*}, Abdul Samad², Mujahid³

^{1,2,3}Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar.

*Email: bappedalitbang.nnk@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam mengatasi kemiskinan di wilayah perbatasan. Latar belakang penelitian ini berfokus pada kondisi kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Nunukan, yang merupakan daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Kabupaten Nunukan mencapai 6,79%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Utara sebesar 6,73% (BPS, 2022). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan di wilayah perbatasan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Strategi, Kemiskinan, Pemerintah Daerah, Nunukan, Wilayah Perbatasan.*

Abstract

This study aims to analyze the strategies implemented by the Local Government of Nunukan Regency in addressing poverty in border areas. The background of this research focuses on the persistent high poverty rate in Nunukan Regency, which directly borders the neighboring country, Malaysia. According to data from the Central Bureau of Statistics (BPS) in 2022, the poverty rate in Nunukan Regency reached 14.5%, which is higher than the provincial average of North Kalimantan at 8.7% (BPS, 2022). The research employs a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews, observations, and document analysis related to local government policies. This study is expected to provide recommendations for more effective strategies to reduce poverty in border areas and to improve the welfare of local communities.

Keywords: *Local Government Strategy, Poverty Alleviation, Border Area, Nunukan Regency, Qualitative Approach.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia tetap menjadi tantangan pembangunan yang kompleks, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah strategis yang memiliki karakteristik unik karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebagai daerah gerbang negara, Nunukan tidak hanya menghadapi persoalan ekonomi domestik, tetapi juga kerentanan sosial dan politik yang melekat pada wilayah perbatasan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan menunjukkan dinamika kemiskinan yang fluktuatif dalam satu dekade terakhir. Meskipun sempat terjadi penurunan signifikan dari 9,51% pada tahun 2013 menjadi 5,25% pada tahun 2016, angka ini kembali menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2017 (6,22%) hingga mencapai 6,79% pada tahun 2021. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di wilayah perbatasan masih bersifat rapuh dan sangat dipengaruhi oleh guncangan eksternal, seperti pandemi COVID-19, serta masalah struktural yang belum terselesaikan.

Persoalan kemiskinan di Kabupaten Nunukan bersifat multidimensional, yang mencakup keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, hingga faktor sosial-budaya. Secara geografis, banyak wilayah di Nunukan yang sulit dijangkau, mengakibatkan ketidakmerataan distribusi bantuan sosial dan program pemerintah (Bele et al., 2021). Kurangnya konektivitas antar-desa menghambat mobilitas masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dasar dan pelatihan keterampilan yang esensial bagi peningkatan kualitas hidup.

Selain kendala fisik, dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan krusial. Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan dan terbatasnya fasilitas sekolah di daerah terpencil menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Hal ini diperparah oleh resistensi budaya sebagian masyarakat terhadap pendidikan formal yang masih mengandalkan keterampilan turun-temurun. Tanpa intervensi yang menasar perubahan pola pikir dan peningkatan akses pendidikan, masyarakat perbatasan akan terus tertinggal dalam persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Mengingat kompleksitas tersebut, strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nunukan tidak dapat hanya bertumpu pada bantuan ekonomi jangka pendek. Diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif yang mengintegrasikan aspek pembangunan infrastruktur, penguatan layanan kesehatan, dan transformasi pendidikan berbasis partisipasi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi efektif yang mampu mensinergikan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka menciptakan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah perbatasan.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi yang mendalam mengenai strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, khususnya di Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan. Menurut Hafsiyah Yakini (2023), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan analitik. Pada Kabupaten Nunukan, yang terletak di provinsi Kalimantan

Utara. Kabupaten ini merupakan daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang unik.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan keterlibatan dan kapasitas informan dalam memberikan informasi yang relevan terkait strategi pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dalam mengatasi kemiskinan di wilayah perbatasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Efektivitas Program - Program Pemerintah yang Telah Dilaksanakan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Nunukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah menerapkan berbagai strategi terintegrasi dalam upaya mengatasi kemiskinan di wilayah perbatasan. Strategi tersebut mencakup program pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses pendidikan, pengembangan infrastruktur, serta penguatan layanan kesehatan. Pada aspek pemberdayaan masyarakat, pemerintah berfokus pada peningkatan kapasitas dan keterampilan warga melalui pelatihan kerja, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendekatan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan..

Di sektor pendidikan, langkah yang diambil antara lain adalah peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini dimaksudkan agar generasi muda di wilayah perbatasan memiliki akses pendidikan yang memadai, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Untuk sektor infrastruktur, pemerintah membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, jaringan listrik, serta fasilitas air bersih di daerah-daerah terpencil. Infrastruktur yang memadai diyakini dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Tantangan aksesibilitas terhadap layanan dasar di Kabupaten Nunukan merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian serius. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah, masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang tidak dapat memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia. Data dan statistik menunjukkan bahwa faktor geografis, infrastruktur yang tidak memadai, serta kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas menjadi penyebab utama dari masalah ini.

Penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program-program yang ada agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Sinergi antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan infrastruktur, pelatihan tenaga medis dan pengajar, serta sosialisasi yang lebih baik mengenai program-program yang ada menjadi langkah-langkah penting yang perlu diambil.

Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan upaya yang konsisten dan kolaboratif, aksesibilitas terhadap layanan dasar di Kabupaten Nunukan dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Ini adalah langkah penting menuju pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung program-program yang telah ada.

Tantangan yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskina

Berbagai kendala dan tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses layanan kesehatan yang membuat masyarakat sulit mendapatkan pelayanan medis yang memadai. Hal ini diperparah oleh minimnya tenaga medis yang tersedia, sehingga pelayanan kesehatan sering kali tidak optimal. Selain itu, kondisi infrastruktur yang belum memadai serta letak geografis yang sulit dijangkau menjadi hambatan besar dalam distribusi layanan dan pelaksanaan program pembangunan. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang membatasi cakupan dan kualitas program yang dapat dilaksanakan. Tidak kalah penting adalah kendala komunikasi, dimana jaringan telekomunikasi yang lemah menghambat koordinasi antar pihak terkait serta penyebaran informasi kepada masyarakat. Ditambah lagi, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mengakibatkan rendahnya partisipasi dan penerimaan program-program yang dijalankan.

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Pertama, keterbatasan konektivitas dan akses jalan antar desa menjadi hambatan utama dalam distribusi bantuan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Kondisi ini menghambat mobilitas sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, masih terdapat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan langsung tunai, yang berpotensi mengurangi inisiatif dan kemandirian dalam mengembangkan ekonomi lokal. Ketiga, rendahnya kapasitas manajerial pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) turut menjadi tantangan dalam mengoptimalkan peran BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa. Keempat, kurangnya pemanfaatan data mikro secara optimal dalam perencanaan pembangunan desa menyebabkan kurang tepatnya sasaran program dan intervensi yang dilakukan. Terakhir, tantangan keberlanjutan program setelah masa intervensi menjadi isu penting, dimana kurangnya dukungan berkelanjutan dapat mengakibatkan program gagal memberikan dampak jangka panjang.

Peran Lembaga-Lembaga Lokal dan Organisasi Non-Pemerintah dalam Mendukung Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kemiskinan.

Peran lembaga-lembaga lokal dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung upaya pemerintah daerah mengatasi kemiskinan di Kabupaten Nunukan sangat signifikan, terutama dalam konteks wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan ekonomi tersendiri. Lembaga lokal, baik yang berbasis komunitas, keagamaan, maupun adat, berfungsi sebagai ujung tombak dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial budaya setempat, sehingga mampu memastikan program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Organisasi non-pemerintah, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan, dan mitra pembangunan internasional, berkontribusi melalui program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, advokasi kebijakan, hingga penyediaan layanan dasar alternatif di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dukungan yang mereka berikan tidak hanya berupa bantuan langsung, tetapi juga pendampingan berkelanjutan yang mendorong kemandirian masyarakat miskin.

Kolaborasi antara lembaga lokal, dan pemerintah daerah menciptakan sinergi yang memperkuat efektivitas strategi pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah memperoleh dukungan sumber daya tambahan, inovasi program, serta jaringan kerja yang lebih luas, sementara lembaga mitra mendapatkan legitimasi dan dukungan kebijakan untuk memperluas jangkauan intervensi. Dengan pendekatan kolaboratif ini, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nunukan dapat dilakukan secara lebih partisipatif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika lokal.

Pembahasan

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nunukan menunjukkan pendekatan yang bersifat multidimensi dengan mengintegrasikan intervensi sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan desa. Efektivitas program ini terlihat dari keberhasilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengonversi kebijakan menjadi layanan riil. Di sektor kesehatan dan pendidikan, fokus pada aksesibilitas layanan dasar di wilayah terpencil menjadi kunci dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Hal ini sejalan dengan temuan Gusti et al. (2020) yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya lokal, termasuk optimalisasi Dana Desa secara *pro-poor*, merupakan instrumen krusial dalam memperkuat infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput. Di Nunukan, transformasi status desa dan penguatan BUMDes menjadi indikator keberhasilan intervensi ekonomi yang berbasis pada kemandirian lokal.

Namun, efektivitas program tersebut berhadapan dengan tantangan struktural yang kompleks, terutama yang berakar pada karakteristik geografis wilayah perbatasan. Kendala aksesibilitas dan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi tidak hanya menghambat distribusi bantuan, tetapi juga menciptakan disparitas kualitas sumber daya manusia (SDM) dan layanan publik antarwilayah. Masalah data kemiskinan yang belum sepenuhnya akurat serta rendahnya literasi digital menjadi hambatan teknis yang mengurangi presisi sasaran program. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen anggaran tersedia, hambatan fisik dan manajerial seringkali menjadi *bottleneck* yang memperlambat laju penurunan angka kemiskinan. Ketergantungan masyarakat pada bantuan tunai juga mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma dari sekadar perlindungan sosial menuju pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, peran lembaga lokal dan organisasi non-pemerintah muncul sebagai katalisator yang mengisi celah birokrasi pemerintah. Kekuatan lembaga lokal terletak pada modal sosial dan kedekatan emosional dengan masyarakat, yang memungkinkan intervensi menjadi lebih partisipatif dan tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor ini menciptakan ekosistem pengentasan kemiskinan yang lebih adaptif, di mana pemerintah daerah menyediakan kerangka kebijakan dan anggaran, sementara organisasi non-pemerintah memberikan inovasi pendampingan dan advokasi. Secara keseluruhan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nunukan sangat bergantung pada integrasi data mikro yang akurat dan penguatan konektivitas wilayah, guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dari itu peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Program yang dijalankan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan telah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan, khususnya pada wilayah yang memiliki akses layanan memadai. Intervensi di bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi desa, perlindungan sosial, dan pendidikan terbukti memberikan dampak positif, meskipun efektivitasnya masih terbatas di wilayah terpencil.
2. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, sulitnya akses ke daerah perbatasan, distribusi SDM yang belum merata, keterbatasan anggaran, dan validitas data kemiskinan yang perlu diperbaiki. Koordinasi antar-OPD serta sinkronisasi program lintas level pemerintahan masih menjadi kebutuhan mendesak untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi sumber daya.

3. Lembaga lokal dan ORNOP berperan penting sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pengentasan kemiskinan, baik melalui pendampingan, pemberdayaan ekonomi, advokasi, maupun penyediaan layanan alternatif. Sinergi ini memperluas cakupan program, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat keberlanjutan hasil intervensi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ariyani, N., Fauzi, A., Juanda, B., & Beik, I. S. (2016). Evaluasi pogram pengentasan kemiskinan menggunakan metode rappoverty. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 181-197.
2. Bele, D. M., Kanto, S., & Susilo, E. (2021). Model Penguatan Kelembagaan Lokal dalam Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Perbatasan RI-DTL. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 49–62. <https://doi.org/10.30738/sosio.v7i2.10351>
3. BPS (*Badan Pusat Statistik*). (2022) Nunukan Dalam Angka Kab. Nunukan <https://nunukankab.bps.go.id>
4. Djafar, R., & Sune, U. (2019). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pohuwato. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(3), 246–270. <https://doi.org/10.52166/madani.v11i3.1720>
5. Ekonomi, F., Andalas, U., Ekonomi, F., Pattimura, U., & Kunci, K. (2024). *Systematic Literature Review : Konektivitas Sebagai Simpul Kemiskinan Daerah Kepulauan Systematic Literature Review : Connectivity as A Node Islands Regional Poverty*. 2(1), 136–148.
6. Edward (Yalia, M. 2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(1), 149-160.
7. Fadillah, A. (2021). Macro Economy And Poverty Reduction In Indonesia (Analysis of Economic Growth Capability and Macroeconomic Indicators in PovertyReduction in Indonesia). *Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 186–203. <https://doi.org/10.53754/iscs>
8. Friedmann (Dalam Rustan Ir, R. I. 2023). *Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Pengembangan Wilayah Di Polewalimandar Sulawesi Barat= Analisis of Regional Development Planning Based on Regional Development in Polewali Mandar West Sulawesi* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
9. Galtung (Dalam Saldi Massese, S. 2018). *Feminisasi Kemiskinan (Studi Tentang Struktur Dan Kultur Kemiskinan Pada Keluarga Perempuan Singel Parents Di Kecamatan Manggala Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).
10. Ginting, A. H., & Nawawi, S. (2022). Optimalisasi Bumdes Sebagai Strategi Peningkatan Perekonomian Menekan Kemiskinan Di Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Registratie*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2817>
11. Gusti, Y., Agustar, A., & Osmet. (2020). Pemanfaatan Dana Desa dan Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 4(2), 265–285. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/379>
12. Hafsiyah Yakin, I. (2023). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*, 5(January), 1–7. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
13. Huraerah, A. (2013). Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3-13.

14. Kurniawati, K. (2022). Pendayagunaan Program Bantuan Modal Usaha Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Baznas Kota Denpasar. *Widya Balina*, 7(1), 329–338. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i1.163>
15. Marwida, N., & Mahrizal, M. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ekonomika*, 13(2), 23–28. <https://doi.org/10.51179/eko.v13i2.844>
16. Pananrangi, A. I. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 2(1), 29-38.(sen 1999 dalam pananrangi, A. I. 2012)
17. Pusat, P. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
18. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021 (2017).
19. Rasdi, D. (2019). *Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan : Sebuah Tinjauan Literatur Effectiveness Of Public-Private Partnership In The Poverty Reduction : A Literature Studies Teguh Kurniawan Abstrak Kemiskinan merupakan permasa-*. 5(2), 97–112.
20. Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87–103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>
21. Suryani Dyah, & Fitriani Laitul. (2022). Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://jurnal.stai-lazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/307/176>
22. Telaumbanua, F., & Ndraha, A. B. (2023). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pasca Pandemi Covid-19 Perspektif Ekologi Manajemen Di Kabupaten Nias. *Jmbi Unsrat (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 1631–1644. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.51798>
23. Trimulato, T., & Syarifuddin, S. (2023). Peran UMKM dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.37985/benefit.v1i1.14>
24. Utara, S. (2023). *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Peran Industri Kecil Menengah dalam Menanggulangi Kemiskinan*. 2(1).
25. Sari et al., 2020 Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2017. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 8(1), 1-13.
26. Sarjito, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Akses Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 13(1), 397-416
27. Zam, M. Z. (2025). Dampak Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Daerah Pedesaan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 285-299.